

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Sumber Daya Alam

1. Pesisir Pantai

Pesisir timur merupakan pesisir pantai yang masuk dalam perairan selat Sunda. Secara keseluruhan panjang garis pantai Kabupaten Lampung Selatan mencapai 247,76 Km² yang meliputi Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Ketapang, Bakauheni, Rajabasa, dan Sragi. Sedangkan pantai timur sendiri memiliki garis patai sepanjang 270 km.

Pesisir pantai timur Lampung merupakan bagian dari Laut Jawa memiliki perairan relatif landai, berkarang dengan tingkat sedimentasi yang tinggi. Karakteristik garis pantai terdiri dari pantai pasir putih, kuarsa, silika, lanau dan secara lokal di tempat endapan lumpur rawa. Berdasarkan Shepard (1948), Pantai Timur Lampung dapat dikelompokkan ke dalam tipe pantai organik. Hal ini dikarenakan pantai yang terbentuk akibat aktivitas hewan atau tumbuhan, termasuk terumbu karang yang dibentuk oleh alga dan oyster, atau tumbuh-tumbuhan seperti mangrove atau rumput-rumput rawa.

Perairan timur Lampung umumnya memiliki kecepatan arus rata-rata bulanan berkisar antara 0 cm/s hingga 45 cm/s. Kecepatan maksimum terjadi pada bulan Januari dan Februari (kecepatan rata-rata mencapai 45 cm/s), sedangkan kecepatan minimumnya ditemui pada bulan Maret (kecepatan rata-rata berkisar antara 0,0 hingga 1,0 cm/s). Arah arus pada umumnya mengalir ke arah Selatan, kecuali

pada bulan Maret di mana arus mengalir ke arah Timur Laut. (LSDA Kabupaten Lampung Selatan, 2012)

Genesis wilayah pesisir timur ini merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang merupakan perluasan Busur Belakang Pegunungan Bukit Barisan Timur ke arah timur yang Kenozoikum. Selama awal sejarah pembentukan cekungan ini, pengendapan oleh laut sangat dominan dan kemudian diikuti oleh pengendapan susut laut. Kegiatan gunung api di Pegunungan Barisan memberikan limpahan bahan tufa dan batu apung di bagian timur Lampung. Endapan rawa, endapan alluvium dan endapan pantai yang luas di bagian timur Provinsi Lampung ini, terbentuk pada masa Holosen. Wilayah timur ini dapat ditumbuhi oleh banyak mangrove karena memiliki endapan lumpur yang cukup banyak sebagai habitat utama mangrove.

2. Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem pesisir tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air dan terlindung dari gelombang besar serta arus pasang surut yang kuat, karena itu hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung (Nybaken, 1998).

Hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bakauheni keseluruhan memiliki luasan 37,5 hektar. Saat ini kawasan mangrove pesisir pantai Desa Bakauheni

memiliki luas kurang lebih 4,5 hektar yang berada di Dusun Pegantungan dan 5,5 hektar yang berada di Dusun Sukarame.

Kerapatan jenis pada suatu area dapat memberikan gambaran ketersediaan dan potensi tumbuhan mangrove (Wantasen, 2002 *dalam* Feronika, 2011). Kerapatan suatu jenis merupakan nilai yang menunjukkan penguasaan suatu jenis terhadap komunitas (Soerianegara dan Indrawan, 1998). Tingkat kerapatan mangrove yang terdapat kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Kerapatan tanaman mangrove

No	Sampel	Jumlah vegetasi (100 m ²)	Kerapatan jenis (Di)
1	I	24	0,24
2	II	30	0,30
3	III	34	0,34
Rata-rata			0,29

Sumber : Olah data, 2017.

Dari Tabel 6 di atas tingkat kerapatan mangrove pada masing-masing sampel diperoleh, kerapatan tanaman sampel I berjumlah vegetasi 24 tanaman mangrove terdiri dari 3 tanaman mangrove berukuran besar, 6 tanaman mangrove berukuran sedang dan 15 tanaman mangrove berukuran kecil memiliki nilai kerapatan jenis yakni 0,24. Kerapatan tanaman sampel II berjumlah vegetasi 30 tanaman mangrove terdiri dari 4 tanaman mangrove berukuran besar (berdiameter 70-120 cm), 5 tanaman mangrove berukuran sedang (berdiameter 15-40 cm) dan 21 tanaman mangrove berukuran kecil (berdiameter 5-10 cm) memiliki nilai kerapatan jenis 0,30 dan pada kerapatan tanaman sampel III berjumlah vegetasi 34 tanaman mangrove terdiri dari 3

tanaman mangrove berukuran besar (berdiameter 60-85 cm), 14 tanaman mangrove berukuran sedang (berdiameter 15-25 cm) dan 17 tanaman mangrove berukuran kecil (berdiameter <10 cm) memiliki nilai kerapatan jenis 0,34. Kerapatan tanaman mangrove yang ada di Desa Bakauheni memiliki nilai rata-rata yakni 0,88 menunjukkan tingkat kerapatan mangrove di lokasi penelitian tergolong rapat. Adapun kondisi eksisting mangrove pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Kondisi Eksisting kerapatan mangrove.

Kerapatan suatu spesies menunjukkan jumlah individu spesies dengan satuan luas tertentu, maka nilai kerapatan merupakan gambaran mengenai jumlah spesies tersebut pada lokasi pengamatan. Nilai kerapatan belum dapat memberikan gambaran tentang bagaimana distribusi dan pola penyebarannya. Gambaran mengenai distribusi individu pada suatu jenis tertentu dapat dilihat dari nilai frekuensinya sedangkan pola penyebaran dapat ditentukan dengan membandingkan nilai tengah spesies tertentu dengan varians populasi secara keseluruhan (Arrijani, 2006).

Jenis mangrove pada kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni paling mendominasi yakni jenis mangrove *Avicennia*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera gymnorhiza*, *Bruguiera cylindrica* (BLHD Lampung Selatan, 2014) Sedangkan jenis mangrove lainnya tersaji dalam Tabel 7.

Tabel 7. Jenis mangrove yang ada di pesisir patai Desa Bakauheni

No	Jenis	Nama Lokal
1	<i>Avicennia marina</i>	Api-api
2	<i>Avicennia rumphiana</i>	Api-api
3	<i>Avicennia officinalis</i>	Api-api
4	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	Tanjang merah
5	<i>Bruguiera cylindrica</i>	Tanjang putih
6	<i>Ceriops tagal</i>	Setigi
7	<i>Rhizophora apiculata</i>	Bakau kecil
8	<i>Rhizophora mucronata</i>	Bakau besar
9	<i>Sonneratia alba</i>	Pidada
10	<i>Excoecaria agallocha</i>	Buta-buta
11	<i>Scyphipora hydrophyllacea</i>	Duduk rambat
12	<i>Rhizophora stylosa</i>	Bakau

Sumber : Olah data, 2017.

Keragaman jenis mangrove yang tumbuh alami di sepanjang pesisir pantai Desa Bakauheni tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove di antaranya yakni pH dan salinitas. Berikut data pH dan salinitas tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil pengukuran parameter lingkungan salinitas dan pH.

No	Nama Dusun	Sampel	Ph	Salinitas (mS)
1	Pegantungan	1	7,5	6,3
		2	7,57	7,17
		3	7,62	6,35
		Rata-rata	7,56	6,61
2	Sukarame	1	7,29	6,09
		2	7,42	6,6
		3	7,65	4,41
		Rata-rata	7,45	5,70

Sumber : Data Primer 2017.

Nilai pH air yang diperoleh berdasarkan pengukuran di lokasi penelitian yakni Dusun Pegantungan berkisar antara 7,5 hingga 7,62. Sedangkan nilai pH di Dusun Sukarame berkisar 7,29 hingga 7,65. Kisaran nilai pH air yang terendah pada lokasi penelitian umumnya baik di Dusun Pegantungan dan Dusun Sukarame memiliki rata-rata pH berkisar 7,56 dan 7,45, hasil tersebut menyatakan bahwa pesisir pantai Desa Bakauheni termasuk perairan produktif sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Kaswadji 1971 *dalam* Saleh, 2002) bahwa perairan dengan pH 7,5-8,5 adalah perairan yang produktivitasnya sangat tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan mangrove. Widiastuti (1999) yang mengemukakan bahwa kisaran pH air antara 6 hingga 8,5, sangat cocok untuk pertumbuhan mangrove.

Salinitas air tanah mempunyai peranan penting sebagai faktor penentu dalam pengaturan pertumbuhan dan keberlangsungan kehidupan. Salinitas air tanah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti genangan pasang, topografi, curah hujan,

masukannya air tawar dan sungai, *run-off* daratan dan evaporasi. Penyusupan air laut ini menyebabkan terdapatnya air tanah dengan kandungan garam. Jika hal ini terjadi di daerah bertemperatur tinggi, dapat terjadi proses evaporasi yang akan diikuti oleh gerakan kapiler yang akan membawa materi-materi garam untuk diendapkan di tanah lapisan atas (Gunawan, 2014). Aksorkoae (1993) menyatakan bahwa salinitas merupakan faktor lingkungan yang sangat menentukan perkembangan hutan mangrove, terutama bagi laju pertumbuhan, daya tahan dan zonasi spesies mangrove.

Nilai salinitas yang diperoleh pada lokasi penelitian berkisar antara 4-7 mS. Dari hasil analisis pengukuran salinitas tertinggi terdapat pada titik sampel 2 Dusun Pegantungan yakni 7.17 mS dan salinitas terendah terdapat pada titik sampel 3 Dusun Sukarame yakni 4,41 mS, hal tersebut dikarenakan lokasi pengambilan sampel terletak di dekat laut, sehingga hasil analisis salinitas paling tinggi. Sedangkan salinitas terendah pengambilan lokasi dilakukan di dekat muara.

3. Pengurangan Ekosistem Mangrove di Pesisir Pantai Desa Bakauheni

Secara umum di sepanjang pantai Desa Bakauheni mengalami pengurangan vegetasi mangrove. Sebagian besar mangrove asli yang tumbuh secara alami sudah rusak akibat akibat penebangan untuk pembukaan lahan tambak secara besar-besaran pada tahun 1998 dan pembangunan dermaga pelabuhan. Hal ini juga ditegaskan oleh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang mengatakan bahwa di pantai timur Lampung terjadi kerusakan hutan mangrove yang luar biasa pada tahun 1998 karena pembukaan tambak besar-besaran untuk budidaya udang windu dan vaname.



Gambar 5. Kondisi eksisting mangrove

Kondisi eksisting mangrove di sepanjang pantai di Desa Bakauheni sebagian besar telah rusak, bahkan hutan mangrove yang ada saat ini hanya tinggal 30% dari hutan mangrove yang pernah tumbuh di sepanjang pesisir pantai Desa Bakauheni.

Kerusakan mangrove di sepanjang pesisir pantai Desa Bakauheni diakibatkan faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam yang menjadikan penyebab kerusakan utama adalah ombak. Pada tahun 2004 penanaman yang telah dilakukan di sekita pelabuhan terdapat kendala akibat terjangan ombak, tanaman mangrove yang masih kecil belum mampu bertahan terhadap terjangan ombak. Hal ini terjadi karena lokasi di pesisir pantai sebagai area penanaman mangrove sangat dekat dengan permukaan air laut dan memungkinkan setiap tahun diterjang oleh ombak. Rata-rata wilayah pesisir pantai saat ini sudah menjadi lahan budidaya tambak, bahkan terdapat tambak yang berada di wilayah laut berbatasan langsung dengan patok biru sebagai pembatas antara wilayah darat dan wilayah laut. Faktor sosial yang menjadikan kendala adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melestariakan

lingkungan dan kurang tegasnya penegakan hukum di tingkat pemerintahan Desa terhadap perlindungan kawasan mangrove dengan pertimbangan toleransi dan rasa kemanusiaan.

B. Potensi Petanian dan Perikanan

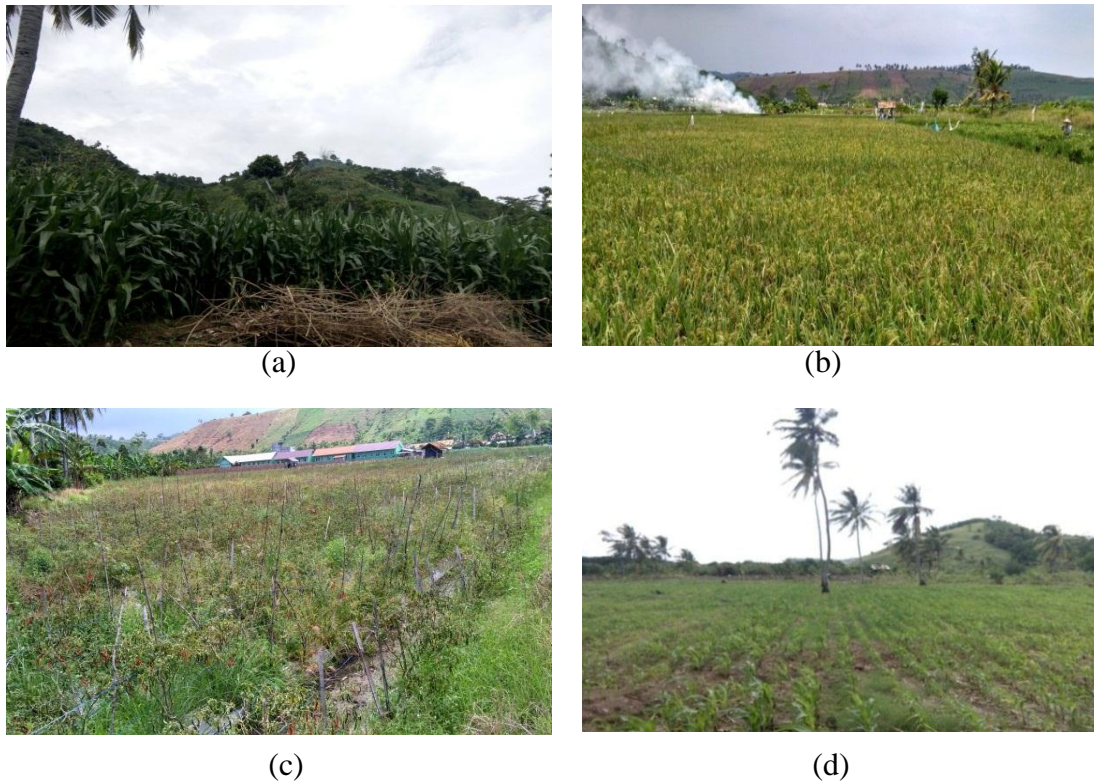
1. Potensi Petanian

Desa Bakauheni merupakan Desa yang sebagian besar wilayahnya perbukitan. Potensi pertanian yang di miliki Desa Bakauheni sangat besar, hal ini dapat dilihat adanya 985 jiwa penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani maupun buruh tani. Selain itu, pemanfaatan lahan banyak diorientasikan pada lahan produktif.

Komoditas tanaman utama Desa Bakauheni yaitu jagung. Jagung dapat ditanam dua kali dalam setahun. Bahkan petani beberapa petani melakukan penanaman jagung sepanjang tahun. Pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian ialah pada lahan perbukitan. Tidak hanya komoditas jagung saja yang dibudidayakan petani ada pula komoditas lainnya seperti pisang, cabai, melon dan padi. Padi, cabai dan melon di tanam petani pada daerah dataran yang berjarak 500-300 meter dari pesisir pantai. Sedangkan jagung ditanam di lahan perbukitan. Hasil panen jagung, pisang, cabai maupun padi bagi petani yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas akan dijual. Namun, bagi petani yang hanya memiliki lahan sempit hasil panen khususnya padi hanya untuk dikonsumsi secara pribadi. Budidaya jagung maupun padi sering kali petani mengalami kegagalan panen. Cuaca yang tidak dapat

diprediksi dan gangguan hama serta penyakit menjadi masalah utama bagi petani.

Berikut ini adalah kondisi lahan pertanian di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni.



Gambar 6. Kondisi Lahan Pertanian Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakauheni (a) Lahan jagung perbukitan (b) Lahan padi (c) Lahan cabai (d) Lahan jagung dataran.

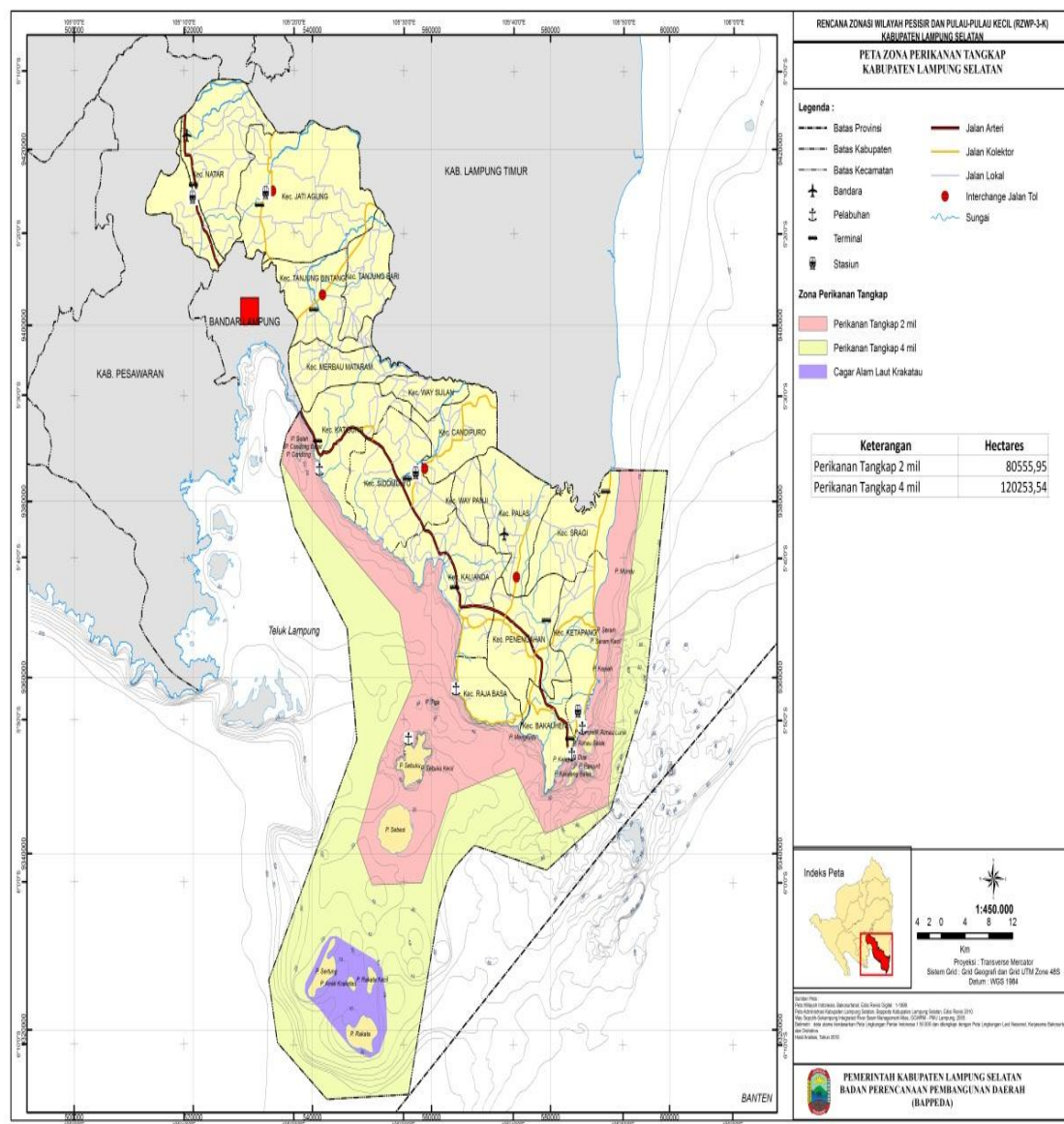
Tahun 2015 Dinas Pertanian mencatat hasil produksi jagung Kecamatan Bakauheni yakni 25.065 ton. Sebagian besar hasil produksi tersebut, Desa Bakauheni merupakan penyumbang produksi panen terbesar. Sebagai daerah dengan potensi perikanan yang besar tidak menutup kemungkinan potensi pertanian yang ada di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni. Dengan adanya lahan pertanian pada

komoditas tanaman pangan dan hortikultura semakin membesar adanya potensi pengembangan agrowisata di sekitar kawasan. Terlebih saat ini petani sedang merintis budidaya tanaman melon dengan luas lahan 2 hektar yang dibina oleh penyuluh pertanian daerah setempat. Para wisatawan nantinya tidak hanya berkunjung menikmati wisata mangrove saja tetapi wisatawan dapat belajar tentang teknik budidaya tanaman melon dan dapat menikmati wisata petik buah.

2. Potensi Perikanan

Selain berpotensi pada pertanian, sektor perikanan merupakan potensi lain yang dimiliki kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni. Mata pencaharian sebagai nelayan telah menjadi bagian dari kearifan lokal kedua di Desa Bakauheni tersebut khususnya penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Dengan lokasi yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda menjadikan laut pesisir pantai Desa Bakauheni memiliki potensi sangat bagus sebagai tempat tinggal dan berkembangbiaknya ikan, sehingga banyak dari masyarakat memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Pada tahun 2013 jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 939,24 ton dan di tahun 2014 produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan menjadi 5.614,84 ton (Dinas Perikanan Lam-Sel, 2013-2014). Aktifitas nelayan masyarakat dusun Pegantungan maupun Sukarame sendiri dilakukan dimulai siang hari hingga sore hari saat cuaca mendukung untuk melaut, beberapa nelayan juga sering kali melaut hingga 2-3 hari. Tipe nelayan terbagi menjadi dua yaitu nelayan

dengan perahu dan nelayan dengan jala. Zona perikanan tangkap dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 7. Peta Zona Perikanan Tangkap.

Jenis ikan yang didapatkan oleh nelayan yaitu jenis ikan yang banyak terdapat di perairan Selat Sunda seperti lemuru, kuniran, kembang, manyung, cumi, dan beberapa jenis ikan lainnya. Hasil tangkapan nelayan jala dalam skala kecil untuk konsumsi secara pribadi, sedangkan hasil tangkapan nelayan perahu akan dikelola di TPI yang ada di Way Apus dan dermaga tangkap tradisional.

Tidak hanya perikanan laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, adapun tambak udang maupun tambak ikan tawar yang dikembangkan dikawasan pesisir pantai Desa Bakauheni. Pengembangan tambak udang di pesisir Desa Bakauheni mulai tahun 1990-an. Pengembangan lahan tambak udang diawali oleh PT. Maju Tambak Sumur pada tahun 1998 mengelola lahan seluas 32 hektar. Kemudian pada tahun 2000-an PT. Acai masuk dan menggarap lahan tambak seluas 31 hektar, dan tambak perorangan milik Sukenda mengelola lahan seluas 15 hektar serta petambak rakyat yang menggarap lahan milik CV. Citra Cakra Murdaya. Sebagian besar petambak membudidayakan udang jenis vaname dan jenis ikan air tawar bandeng.

Sebelum adanya tambak udang, kawasan tersebut merupakan rawa-rawa. Perkembangan tambak udang menjadi salah satu potensi lain pesisir Desa Bakauheni selain sektor pertanian. Pada awal perkembangan tambak udang di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni di tahun kelima setelah masa panen udang banyak pemilik tambak yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan udang pada lahan tambak terserang oleh virus mio yang menyebar hampir seluruh tambak yang ada serta kondisi cuaca yang tidak stabil.

Kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan. Pengembangan kawasan budidaya haruslah mendapat persetujuan dan ijin resmi dari dinas maupun lembaga pemerintahan. Sampai saat ini, dari seluruh tambak udang yang sepanjang pesisir pantai Desa Bakauheni hanya PT. Maju Tambak Sumur dan lahan tambak milik Sukenda serta lahan tambak rakyat binaan Dinas Perikanan yang memiliki ijin resmi, sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa tambak udang di pesisir pantai Desa Bakauheni illegal atau tidak memiliki ijin resmi pembangunan tambak udang dari pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Lahan tambak yang sering menjadi tempat kunjungan dinas atau instansi luar daerah Lampung Selatan dan Lampung untuk penelitian, studi banding atau sekedar melihat-lihat dan menjadi tempat mahasiswa atau pelajar SMK perikanan melakukan magang/PKL ialah lahan tambak udang milik Sukenda.

Saat ini, hampir semua petakan masih produktif, walau ada beberapa tambak diistirahatkan untuk kemudian dilakukan aktifitas tambak. Luas tambak bervariasi dari 1000-2500 m². Walau petakan lahan tambak hampir semua produktif, namun ada kondisi tambak tidak terurus dan hingga digenangi dan banyak ditumbuhi rumput serta alang-alang, hal tersebut dikarenakan beberapa tahun belakangan produktifitas tambak menurun. Selain itu, peralatan yang digunakan untuk tambak dibiarkan tergeletak di halaman *mess* pekerja tambak. Banyak bangunan permanen yang dibangun diareal tambak sebagai gudang penyimpanan, rumah bagi pekerja/penjaga

hingga bengkel untuk alat-alat tambak. Kondisi eksisting tambak udang milik Sukenda tersaji dalam Gambar 7.



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 8. Kondisi Eksisting Tambak Udang (a) Tambak udang produktif (b) Mesin kincir tambak (c) Pipa filter (d) Halaman mess karyawan.

C. Potensi Ekonomi dan Potensi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Bakauheni ini pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat semi modern, dalam artinya masyarakat ini sedikit ada pengaruh dari kebiasaan masyarakat karena kebiasaan dan tingkah laku setiap hari cenderung memiliki kebiasaan ada aktifitas yang harus dilakukan pada pagi hingga sore hari.

Adanya fasilitas yang mendukung dan dapat menghubungkan dengan tempat bermukimnya masyarakat mempengaruhi kegiatan serta aktifitas yang dilakukan masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak udang dan mangrove.

Masyarakat Desa Bakauheni yang bermukim di kawasan pesisir pantai area tambak udang dan mangrove sebagian besar masyarakat pendatang. Latar belakang masyarakat asli yang bermukim di pesisir pantai Desa Bakauheni ialah suku Bugis dan Lampung, sedangkan masyarakat pendatang memiliki latar belakang seperti suku Jawa dan Sunda. Masyarakat pesisir pantai Desa Bakauheni memiliki aktifitas sebagai petani, nelayan, dan peternakan.

Masyarakat di kawasan yang masih menjunjung tinggi adat setempat, sehingga memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang khas. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha akan kelestarian lingkungan terutama hutan mangrove. Pada dasarnya masyarakat yang bermukim di pesisir pantai sangat mengetahui pentingnya fungsi hutan mangrove. Namun, seringkali masyarakat sekitar masih memanfaatkan hutan mangrove tidak dengan bijak. Pemanfaatan kayu dari tanaman mangrove secara berlebihan yang sering kali menimbulkan kerusakan hutan mangrove. Belum adanya peraturan yang tegas mengenai pelarangan penebangan mangrove menjadikan masyarakat serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masih bertindak seenaknya.

Kesadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari hilangnya hutan mangrove saat ini baru dirasakan. Beberapa upaya masyarakat pesisir pantai

dalam menjaga kelestarian saat ini sedang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya kelompok peduli mangrove di Desa Bakauheni khususnya Dusun Pegantungan dan Dusun Sukarame. Fungsi dibentuknya kelompok tersebut ialah mengerakkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai pentingnya kelestaraan hutan mangrove dan mengawasi kegiatan penebangan dan pencurian kayu mangrove liar serta penggerak reboisasi kawasan.

Pengelolaan hutan mangrove secara perspektif sosial masyarakat pesisir sudah cukup efektif. Melihat fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi serta sebagai habitat bagi beberapa jenis ikan, sangatlah berpengaruh terhadap tingkat produktifitas biota laut termasuk kepiting dan kerang yang mana organisme ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat menjanjikan bagi masyarakat setempat untuk menambah penghasilan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa secara tidak langsung keberadaan hutan mangrove di pesisir pantai Desa Bakauheni telah memberikan lapangan usaha berupa peningkatan kebutuhan masyarakat setempat.

D. Persepsi Masyarakat dan Pemerintah

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan salah satu peran penting dalam melakukan perencanaan setiap objek penelitian. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan saran, masukan rekomendasi suatu objek kajian demi terciptanya keberhasilan penataan dan perencanaan suatu kawasan. Penggunaan elemen

masyarakat dalam penataan kawasan pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove ialah untuk mengetahui secara umum potensi dan kondisi kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove. Persepsi masyarakat diambil melalui wawancara langsung dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dalam bentuk kuisisioner. Hasil kuisisioner dianalisis menggunakan persentase (%) untuk diambil jumlah persentase yang paling besar untuk mencari nilai atau skor terbesar jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan metode deskriptif. Responden merupakan penduduk asli Desa Bakauheni yakni penduduk Dusun Sukarame, Dusun Pegantungan dan Dusun Simpang Tiga dengan jumlah responden 38 orang.

a. Hutan Mangrove

Mangrove merupakan salah satu potensi kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni yang dijadikan objek pengembangan wisata berbasis ekowisata. Hutan mangrove memiliki peranan dan fungsi penting dalam menjaga kestabilan ekosistem pesisir pantai. Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi hutan mangrove yang ada merupakan poin penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove guna mendukung kelayakan kawasan dalam pengembangan wisata berbasis ekowisata. Tingkat pengetahuan masyarakat dapat diukur dengan memberikan pertanyaan pada responden yang mewakili masyarakat kemudian dibuat persentase seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Pengetahuan masyarakat tentang hutan mangrove.

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Awal mula adanya mangrove	Tumbuh alami	27	71,05
		Program pemerintah	8	21,05
		Upaya penanaman dari masyarakat	3	7,89
2	Kondisi ekosistem mangrove saat ini	Sangat terjaga	8	21,05
		Terjaga	16	42,11
		Tidak terjaga	12	31,58
		Sangat tidak terjaga	2	5,26
3	Pentingnya mangrove di pesisir pantai	Penting	38	100
		Tidak penting	0	0
4	Pengetahuan peranan dan fungsi mangrove	Ya	35	92,11
		Tidak	3	7,89
5	Peran dan fungsi mangrove yang diketahui	Melindungi pantai dari erosi dan abrasi	24	63,16
		Melindungi pemukiman penduduk dari terpaan angin laut	11	28,95
		Mencegah intrusi air laut	9	23,68
		Wilayah penyangga	5	3,16

Sumber : Olah data, 2017.

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa 71,05 % persepsi masyarakat menyatakan bahwa hutan mangrove yang terdapat dipesisir pantai tumbuh secara alami, 21,05 % adalah upaya penanaman dari pemerintah dan 7,89 %

upaya penanaman dari masyarakat. Persepsi masyarakat mengenai kondisi ekosistem mangrove yang ada saat ini menunjukkan 63,16 % sangat terjaga dan terjaga sedangkan persentase 36,84 % menunjukkan masyarakat berpendapat bahwa kondisi mangrove saat ini tidak terjaga dan sangat tidak terjaga. Persepsi masyarakat juga menunjukkan 100 % masyarakat mengetahui pentingnya hutan mangrove pada kawasan pesisir pantai. Pengetahuan masyarakat mengenai peran dan fungsi mangrove sebesar 92,11 % masyarakat menyatakan menjawab ya (telah mengetahui) dan persentase 7,98 % masyarakat menjawab tidak mengetahui. Kondisi hutan mangrove berdasarkan persepsi masyarakat sendiri didapat 42,11 % masyarakat menyatakan hutan mangrove yang ada terjaga dengan baik. Pengetahuan peranan dan fungsi hutan mangrove yang diketahui masyarakat pesisir pantai berdasarkan persepsi masyarakat menyatakan 63,16 % masyarakat mengetahui peran dan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi, 28,95 % pelindung pemukiman penduduk dari terpaan angin laut, 23,68 % mencegah intruksi air laut dan 3,16 % sebagai wilayah penyangga. Artinya, tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bakauheni tentang hutan mangrove beserta peranan dan fungsinya sudah baik. Artinya dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan peran mangrove menjadi dasar keberhasilan pengelolaan mangrove dapat dioptimalkan melalui strategi pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat yang mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam. Mengelola disini mengandung arti, masyarakat ikut memikirkan, merencanakan, memonitor dan mengevaluasi sumberdaya ekosistem hutan

mangrove dan manfaat sumberdaya tersebut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem tersebut (Bengen, 2002).

b. Ekowisata

Pengetahuan suatu kawasan pariwisata dalam hal ini ekowisata, merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga ekosistem hutan mangrove dan mengembangkan daya tarik kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni berdasarkan sumber daya potensial yang dimiliki. Peran masyarakat sekitar kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni berperan sebagai penentu obyek memiliki daya tarik atau tidak kawasan. Pengetahuan tentang ekowisata menjadi acuan dalam pengembangn ekowisata dan menentukan zonasi kawasan wisata di pesisir pantai Desa Bakauheni dapat di lihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pengetahuan masyarakat tentang ekowisata.

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Apakah saudara mengetahui ekowisata	Ya	33	86,84
		Tidak	5	13,16
2	Apakah yang saudara ketahui dari ekowista	Taman Nasional	8	21,05
		Wisata Alam	18	47,37
		Wisata Hutan Raya	5	13,16
		Lainnya	2	5,26

Sumber: Olah data, 2017.

Berdasarkan Tabel 10 persepsi masyarakat di atas menunjukkan bahwa 86,84 % responden mengetahui ekowisata dan 13,16% responden tidak mengetahui

ekowisata. Persepsi masyarakat menunjukkan tingkat pengetahuan terhadap bentuk ekowisata sebagai taman nasional sebesar 21,05%, wisata alam 47,37%, wisata hutan raya 13,16% dan yang menjawab lainnya 5,26%. Artinya, tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bakauheni tentang ekowisata sudah cukup baik. Pengembangan ekowisata di kawasan pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangannya sehingga pengetahuan tentang ekowisata menjadi poin penting yang perlu diketahui. Di sini masyarakat menjadi faktor penting dalam perencanaan dan pengembangan wisata sebab keberlanjutan dan keberlangsungan pengembangan wisata ekowisata bergantung pada budaya dan perilaku masyarakat setempat. Jika masyarakat telah memiliki bekal pengetahuan mengenai tidak mendukung dan tidak berpartisipasi dalam pengembangan wisata ekowisata maka pengembangan wisata tidak akan berjalan sesuai harapan.

Perencanaan pengembangan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove mendapat respon positif dari masyarakat. Pada Tabel 11 menunjukkan persepsi masyarakat sebesar 78,95 % menyatakan bahwa kawasan tersebut terdapat pengembangan wisata yang dilakukan, persepsi masyarakat sebesar 21,05 % menyatakan kawasan pesisir tidak ada pengembangan wisata yang dilakukan. Pendapat masyarakat mengenai pengembangan wisata berbasis ekowisata mendapatkan respon sangat baik dengan persentase 100% masyarakat berpikir bahwa pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove

sangat setuju untuk dijadikan kawasan ekowisata. Pada dasarnya masyarakat telah mendukung adanya pengembangan wisata di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni.

Tabel 11. Persepsi masyarakat terhadap pengembangan wisata dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata di pesisir pantai Desa Bakauheni.

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Adakah pengembangan wisata yang telah dilakukan	Ada	30	78,95
		Tidak ada	8	21,05
2	Kawasan pesisir pantai Desa Bakuhei menjadi kawasan ekowisata	Setuju	38	100
		Tidak Setuju	0	0
3	Dukungan masyarakat terhadap pengembangan kawasan ekowisata	Mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaan	18	47,37
		Mendukung, tetapi tidak ikut dalam pengelolaannya	17	44,74
		Tidak mendukung karena kurang potensial.	2	5,26
4	Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan wisata	Dinas Pariwisata	9	23,68
		Pemerintah Desa	4	10,53
		Masyarakat sekitar	21	55,26
		Lainnya	2	5,26

Sumber: Olah data, 2017.

Dari 38 responden yang diwawancarai tentang dukungan masyarakat terhadap pengembangan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni menjadi ekowisata seluruhnya menyatakan mendukung. Namun, 47,37% menjawab mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaan, 44,47% menjawab mendukung saja dan 5,26% yang menyatakan tidak mendukung. Sebagian masyarakat tidak hanya ingin mendukung tetapi ingin juga berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata yang nantinya akan dikembangkan. Terlibatnya masyarakat Desa Bakauheni dalam pengelolaan ekowisata dapat mengurangi tingkat pengangguran bagi masyarakat yang belum memiliki mata pencaharian. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mempermudah pelaksanaan kegiatan wisata di pesisir pantai Desa Bakauheni. Hal tersebut didukung pendapat Slamet (1985) bahwa partisipasi masyarakat sangatlah mutlak demi keberhasilan pembangunan. Selanjutnya menurut beliau pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil. Banyak pendapat mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana upaya memberi dukungan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang datang dari pemerintah.

Berdasarkan Tabel 11 di atas juga, masyarakat berpendapat mengenai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan wisata di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni 23,68% dinas pariwisata, 55,26% masyarakat, 10,53% pemerintah Desa dan 5,26% menjawab lainnya. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan wisata sangat diperlukan. Masyarakat memberi andil besar dalam kesuksesan ekowisata. Keterlibatan masyarakat memberikan rasa memiliki, menjaga

dan melestarikan ekowisata yang telah dikembangkan. Pemerintah menjadi penanggung jawab penuh dalam pengelolaan kawasan wisata di suatu daerah, pemerintah yang dimaksud ialah Dinas Pariwisata yang membawahi bidang pengelolaan pariwisata suatu daerah. Badan Lingkungan dan Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pun menjadi penanggung jawab pengembangan wisata pada kawasan konservasi.

Pengembangan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sebagai kawasan ekowisata perlu adanya pertimbangan dan persepsi masyarakat mengenai objek wisata yang akan dikembangkan. Objek wisata ditentukan berdasarkan potensi dan persepsi masyarakat sebagai pelaku pengelola wisata. Persepsi masyarakat tentang pengembangan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sebagai kawasan ekowisata terdapat dalam Tabel 12.

Tabel 12. Persepsi masyarakat terhadap objek wisata yang dikembangkan dan sarana prasarana penunjang wisata kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni

No	Komponen	Pendapat	Persentase (%)
1	Objek wisata yang cocok untuk dikembangkan	Wisata pantai	42,11
		Wisata mangrove	42,11
		Taman bermain	5,26
		Kawasan pertanian	2,63
		Lainnya	7,89
2	Sarana dan prasarana yang perlu disediakan	Sarana pendukung (kamar kecil, mushola, dan pusat informasi)	73,68
		Area bermain anak-anak	36,84
		Tempat santai/istirahat pengunjung (gubuk)	52,63
		Rumah makan dan oleh-oleh hasil tambak udang	28,95
		Perbaikan jalan dan lahan parker	57,89
		Lainnya	23,68

Sumber: Olah data, 2017.

Persepsi masyarakat pada Tabel 12 menunjukkan objek wisata yang cocok ialah wisata pantai dan mangrove dengan perolehan persentase yang sama yakni 42,11 %. Hal ini tentunya tidak terlepas dari letak geografis kawasan yang berada di wilayah pesisir pantai dan memiliki kawasan hutan mangrove sehingga masyarakat lebih melihat pada potensi wisata pantai dan mangrove daripada potensi yang lainnya.

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari daya dukung dan penunjang objek wisata yang utama. Sarana dan prasarana dapat berupa fasilitas umum seperti mushola, rumah makan, kamar mandi, area parkir hingga pada akses jalan yang dilalui

untuk dapat mengunjungi kawasan tersebut. Pada Tabel 12 tentang sarana dan prasarana yang perlu diadakan dimaksudkan untuk dapat melihat kala prioritas masyarakat sebagai penyediaan jasa dan fasilitas wisata. Persepsi masyarakat menunjukkan, 73,68% menginginkan adanya sarana pendukung seperti kamar kecil, mushola, dan pusat informasi. Persepsi masyarakat lainnya menunjukkan, 57,89% menginginkan adanya perbaikan jalan dan lahan parkir, 52,63% tempat santai/istirahat pengunjung (gubuk), 36,84% area bermain anak-anak, 28,95% rumah makan dan oleh-oleh hasil tambak udang dan 23,68% menjawab lainnya. Masyarakat menginginkan adanya sarana pendukung seperti kamar kecil, mushola, dan pusat informasi, perbaikan jalan dan area parkir, tempat santai/istirahat pengunjung (gubuk), area bermain anak-anak, rumah makan dan oleh-oleh hasil tambak udang, dan lainnya. Prioritas utama ada pada penyediaan sarana pendukung seperti kamar kecil, mushola, dan pusat informasi, hal ini ditentukan karena masyarakat berkeinginan menciptakan kawasan wisata yang nyaman, dan memudahkan pengunjung untuk menjangkau tempat ibadah dan kamar kecil serta membantu pengunjung agar lebih mudah mendapatkan informasi mengenai area dan *spot-spot* wisata yang ada. Keinginan masyarakat yang juga menjadi prioritas ialah adanya perbaikan jalan dan lahan parkir tentunya karena akses jalan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sangat diperlukan perbaikan dan pembukaan lahan parkir baru untuk wisatawan yang berkunjung. Akses jalan merupakan hal terpenting dalam pengembangan wisata. Tempat wisata akan berkembang pesat bila keterjangkauan

lokasi mudah. Penyediaan dan pembangunan fasilitas umum, saran dan prasaran oleh pengembang akan disamakan dengan persepsi dan keinginan masyarakat.

Pengembangan kawasan pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata tentunya akan memberikan manfaat dan harapan baru bagi masyarakat. Persepsi masyarakat tentang manfaat yang diperoleh dan harapan masyarakat dari pengembangan kawasan ekowisata di kawasan pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove Desa Bakauheni disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Persepsi masyarakat tentang manfaat dan harapan.

No	Komponen	Pendapat	Persentase (%)
1	Manfaat yang akan diperoleh dari pengembangan wisata dikawasan pesisir pantai	Membuka lapangan kerja baru	68,42
		Meningkatkan daya tarik kawasan	52,63
		Tidak ada manfaat	0
		Lainnya	15,79
2	Harapan masyarakat dengan adanya pengembangan wisata	Memberi lapangan kerja	44,74
		Meningktkan perekonomian	31,58
		Mengangkat potensi daerah	34,21
		Menjadi daerah tujuan wisata kabupaten	21,05
		Lainnya	10,53

Sumber: Olah data, 2017.

Menurut masyarakat Desa Bakauheni, manfaat yang paling dirasakan ialah adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat denga persentase 68,42% pada persepsi

masyarakat Tabel 13. Adanya lapangan kerja baru mengurangi tingkat pengangguran dan menjadikan mata pencaharian masyarakat Desa. Manfaat lainnya ialah meningkatkan daya tarik kawasan tersebut dengan persentase 52,63%.

Harapan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata di kawasan pesisir pantai area tambak dan mangrove ialah dapat memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat 44,74 %. Seperti halnya yang tersaji pada Tabel 13, masyarakat berharap adanya penataan pesisir pantai area tambak dan mangrove dapat mengangkat potensi daerah 34,21 %. Harapan lainnya ialah meningkatkan perekonomian bagi masyarakat 31,58 % dan menjadi daerah tujuan wisata kabupaten 21,05 % serta persepsi masyarakat yang menjawab lainnya sebesar 10,53 %. Sesuai dengan konsep pembangunan kepariwisataan berdasarkan pada pengembangan masyarakat lokal (*community based tourism*), maka pengembangan kegiatan pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta diarahkan agar dapat mengakomodasikan upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan pada konsep tersebut, maka pengembangan kegiatan pariwisata diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal (Siswanto, 2003).

c. Tambak udang

Pengembangan tambak udang di pesisir pantai timur kabupaten Lampung Selatan memang sering kali menjadi perdebatan. Namun, keberadaan tambak udang ternyata mampu mengangkat potensi daerah pada sektor perikanan. Masyarakat sekitar pesisir pantai memiliki persepsi dan pandangan tersendiri terhadap dampak

yang timbul keberadaan tambak udang di kawasan tersebut. Berikut pernyataan masyarakat mengenai dampak adanya tambak udang yang tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14. Persepsi masyarakat tentang tambak udang

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Dampak positif yang dirasakan	Meningkatkan perekonomian masyarakat	8	21,05
		Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar	5	13,16
		Mengangkat potensi daerah	12	31,58
		Lainnya	1	2,63
2	Dampak negatif yang dirasakan	Pencemaran lingkungan	5	13,16
		Dikuasai asing	7	18,42
		Lainnya	0	0

Sumber: Olah data, 2017.

Dari persepsi masyarakat pada Tabel 14 di atas masyarakat menyatakan pendapat bahwa keberadaan tambak udang telah memberi dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dari Tabel 14 tersebut dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar ialah mengangkat potensi daerah sebesar 31,58 %, adapun pendapat lain dampak positif yang dirasakan yakni 21,05 % meningkatkan perekonomian masyarakat, 13,16 % memberikan lapangan kerja dan 2,63% berpendapat lainnya. Hal yang pasti dirasakan oleh masyarakat memang adanya

peningkatan potensi daerah sebagai salah satu kawasan sektor perikanan yang memang memiliki potensi perairan tinggi di kawasan pesisir pantai timur kabupaten Lampung Selatan. Selain itu dampak positif yang dirasakan yakni peningkatan taraf perekonomian masyarakat sekitar. Dampak positif adanya tambak udang di kawasan pesisir pantai tidak dirasakan masyarakat sebagai lapangan kerja baru karena sebagai besar pekerja tambak merupakan warga yang berasal dari luar daerah seperti Tanggerang dan Pangandaran.

Bukan hanya dampak positif saja yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya tambak udang. Namun, masyarakat juga berpendapat bahwa tambak udang memberikan dampak negatif yang ditunjukkan pada Tabel 14. Menurut masyarakat dampak yang ditimbulkan adanya tambak udang yakni adanya pencemaran lingkungan 13,16% dan dikelola investor asing 18,42 %. Pembangunan tambak di areal mangrove sebenarnya bukan tanpa masalah. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi para pembuka lahan, seperti pengasaman tanah, tidak bercampurnya tanah serta berkurangnya anakan untuk keperluan perkembangan ikan (Giesen, dkk, 1991).

2. Persepsi Pemerintah

Sebagai pemangku kebijakan pemerintahan memiliki peran penting dan wewenang dalam mendukung, memutuskan dan memberikan izin dalam melakukan perencanaan setiap objek penelitian. Penggunaan elemen pemerintah dalam penataan pesisir pantai Desa Bakauheni ialah untuk mengetahui keselarasan program dan

kebijakan yang telah diatur maupun dibuat sesuai dengan pengembangan tataruang kawasan serta mengetahui dukungan yang pemerintah berikan untuk masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata. Responden merupakan perangkat pemerintah yang menjabat di badan perintahan seperti BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa, Badan Lingkungan Hidup Lampung Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Desa Bakauheni dan Kepala Dusun Sukarame dengan jumlah responden 8 orang.

Tabel 15. Persepsi Pemerintah mengenai adanya mangrove

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pendapat tentang keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai area tambak udang	Sangat setuju	6	75
		Setuju	2	25
		Tidak setuju	0	0
		Sangat tidak setuju	0	0
2	Pentingnya kawasan hutan mangrove di pesisir pantai	Sangat penting	8	100
		Biasa saja	0	0
		Tidak penting	0	0
3	Kondisi hutan mangrove saat ini	Sangat terjaga	0	0
		Terjaga	1	12,5
		Tidak terjaga	7	87,5
		Sangat tidak terjaga	0	0
4	Jika pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove dikembangkan sebagai ekowisata	Setuju	8	100
		Tidak setuju	0	0

Sumber: Olah data, 2017

Berdasarkan persepsi pemerintah Tabel 15 diatas mengenai pendapat pemerintah persentase sebanyak 75% sangat setuju dengan adanya/keberadaan mangrove di pesisir pantai Desa Bakauheni dan 25% menyatakan setuju. Artinya,

tingkat pemahaman pemerintahan mengenai keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir sangatlah baik. Keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni dirasa sangatlah penting guna mengantisipasi dan menanggulangi abrasi pantai disekitar kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari persepsi pemerintah mengenai peranan penting hutan mangrove di kawasan pesisir pantai yakni sebesar 100% pemerintah menyatakan penting. Sedangkan pendapat pemerintah mengenai kondisi hutan mangrove saat ini ialah 87,5% menyatakan tidak terjaga dan 12,5% pemerintah menyatakan terjaga. Tingkat pengetahuan tentang kondisi mangrove di kalangan pemerintah dirasa sangat penting guna penentuan kebijakan dan langkah ke depan dalam menangani kerusakan mangrove yang ada di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni.

Peran serta dan pendapat pemerintah dalam pengembangan kawasan pesisir pantai yang dilakukan masyarakat menjadi kawasan ekowisata, demi menunjang keberlangsungan pengembangan sangat diperlukan. Sebab pemerintah memiliki kebijakan dan wewenang mengenai pemanfaatan kawasan yang diatur dalam PERDA RTRW 2011-2033 Kabupaten Lampung Selatan. Persepsi pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata pada Tabel 15 menunjukkan persentase 100 % menyatakan pemerintah setuju. Hal ini berarti pengembangan ekowisata untuk kedepannya dapat berjalan secara berkelanjutan dengan kebijakan program-program yang diberikan pemerintah dalam pengembangan wisata ekowisata.

Persepsi pemerintah tentang partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kawasan pada Tabel 16 di atas menunjukkan pesentase 87,5 % pemerintah

menyatakan bahwa masyarakat sangat mendukung dan ingin berpartisipasi dalam mengelolanya dan persentase 12,5% pemerintah menyatakan mendukung dan tidak ikut serta dalam pengelolaannya. Tidak ada pendapat pemerintah tentang tidak mendukungnya masyarakat dan sikap masyarakat terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata, dibuktikan pada hasil kuesioner Tabel 16 persentase 0%. Artinya, dalam hal ini pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan pengelolaan pariwisata dan lebih mengetahui mengenai lingkungan sekitar kawasan pengembangan wisata. Selain itu jika pengelolaan pada kawasan wisata dilakukan masyarakat, masyarakat juga dapat mengawasi pencurian tanaman dan perusakan hutan mangrove. Dengan demikian kelestarian hutan mangrove di sekitar kawasan pesisir pantai dapat terjaga.

Tabel 16. Persepsi mengenai pengadaan sarana dan prasarana.

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Partisipasi masyarakat mengenai pengembangan ekowisata	Sangat mendukung dan ingin berpartisipasi dalam mengelolanya	7	87,5
		Mendukung dan tidak ikut serta dalam pengeolaannya	1	12,5
		Tidak mendukung	0	0
		Masyarakat acuh terhadap pengembangan	0	0
2	Fasilitas yang disediakan guna mendukung berkembangannya ekowisata	Tempat penginapan	5	62,5
		Tempat parker	8	100
		Tempat ibadah	8	100
		Rumah makan	7	87,5
		Pusat informasi/tempat penerimaan pengunjung	6	75
3	Fasilitas umum yang perlu diberikan untuk menjangkau kawasan pesisir pantai	Pembukaan jalur utama menuju pesisir pantai	5	62,5
		Pembukaan jalur alternative	3	37,5
		Perbaikan akses jalan masuk	6	75

Sumber: Olah data, 2017.

Rasa nyaman dan aman menjadi hal terpenting bagi wisatawan yang perlu diperhatikan oleh pengembang dan pengelola kawasan wisata. Penyediaan fasilitas penunjang juga sangat perlu untuk mendukung pengembangan kawasan ekowisata. Fasilitas yang perlu disediakan seperti tempat penginapan, tempat parkir, tempat ibadah, rumah makan dan pusat informasi/tempat penerimaan pengunjung. Berdasarkan Tabel 16 persepsi pemerintah persentase 100% menyatakan pemerintah menginginkan adanya fasilitas tempat ibadah dan tempat parkir, 87,5% menyatakan menginginkan adanya rumah makan, 75% menginginkan adanya pusat informasi/tempat penerimaan pengunjung, dan 62.5% menginginkan adanya tempat penginapan. Tidak hanya fasilitas penunjang di kawasan pengembangan, fasilitas umum akses jalan menuju kawasan pengembangan ekowisata pesisir pantai juga penting diperhatikan. Hal ini, pemerintah menyatakan persentase 75% menginginkan adanya perbaikan akses jalan masuk menuju kawasan pesisir pantai, 62,5% menginginkan adanya pembukaan jalur utama menuju pesisir pantai, dan 37,5% pembukaan jalur alternatif. Penyediaan fasilitas penunjang seperti tempat ibadah, tempat parkir, rumah makan, pusat informasi/tempat penerimaan pengunjung, tempat penginapan dan fasilitas akses jalan yang memadahi sangatlah diperlukan. Ketersediaan fasilitas yang memadahi akan menjadi tolak ukur kepuasan pengunjung akan tempat wisata yang dikunjungi, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang akan datang selanjutnya.

Tabel 17. Persepsi terhadap kunjungan wisata potensi unggulan dan dukungan pemerintah

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Motivasi wisatawan berkunjung	Sekedar rekreasi	4	50
		Ingin belajar dan mengetahui tentang tanaman mangrove	3	37,5
		Hanya sekedar ingin menikmati suasana	1	12,5
		Ingin berpartisipasi dalam menanam mangrove untuk menjaga kelestarian kawasan	0	0
2	Potensi yang diunggulkan dalam pengembangan ekowisata	Target pengunjung	2	25
		Keberagaman jenis mangrove	4	50
		Sumber daya alam/potensi	2	25
		Wisata tambak	0	0
3	Upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata	Memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan pesisir pantai sebagai kawasan konservasi mangrove	3	37,5

Sumber: Olah data, 2017.

Arah pengembangan wisata perlu diperhatikan dan diselaraskan dengan tujuan wisatawan yang akan berkunjung, potensi yang diunggulkan dan upaya pemerintah dalam mendukung berkembangnya suatu kawasan wisata. Pendapat dan pernyataan pemerintah dalam hal ini terdapat pada persepsi pemerintah Tabel 17 yakni persentase 50% pemerintah menyatakan bahwa pengunjung yang berkunjung hanya ingin sekedar rekreasi, 37,5% ingin belajar tentang tanaman mangrove, dan

12,5% hanya ingin menikmati suasana wisata. Sementara pendapat pemerintah mengenai partisipasi pengunjung/wisatawan dalam menanam mangrove untuk menjaga kelestarian kawasan persentasenya 0%. Pengembangan ekowisata pada kawasan pesisir pantai memang difokuskan pada hutan mangrove, namun dalam hal ini pemerintah tidak menyatakan pendapat tujuan pengunjung/wisatawan partisipasi dalam menanam mangrove untuk menjaga kelestarian kawasan, sebab wisatawan kebanyakan wisatawan dan pengunjung mengunjungi kawasan wisata hanya menikmati suasana dan rekreasi. Pada Tabel 17 mengenai potensi yang diunggulkan persentase 50% pemerintah menyatakan potensi yang diunggulkan keberagaman jenis mangrove, karena disepanjang pesisir pantai Desa Bakauheni memiliki 12 jenis mangrove yang sangat menarik untuk diketahui dan dipelajari. Persentase 25% pemerintah menyatakan potensi yang diunggulkan ialah sumber daya alam dan target pengunjung. Sedangkan untuk potensi tambak pemerintah memilih dijadikan potensi unggulan karena sebagian besar lahan tambak yang berada pada kawasa pesisir pantai Desa Bakauheni kepemilikan swasta.

Dukungan mengenai pengembangan wisata dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pengembangan kawasan wisata dapat berjalan dengan baik. Pada Tabel 17 persentase 50% pemerintah memberi dukungan dalam mengawasi kawasan pesisir pantai sebagai kawasan konservasi, 37,5% memberi dukungan pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan pesisir pantai sebagai kawasan konservasi mangrove dan 12,5% pemerintah memberi dukungan berupa

materi untuk pengembangan kawasan. Peranan pemerintah dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang dan memegang kebijakan.

E. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan dalam mencapai daerah/objek tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan wisata pada sebuah destinasi untuk dapat dicapai wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk mengetahui tingkat kemudahan akses kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni selain dapat diketahui dengan survei langsung di lapangan diperlukan juga persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove yang tersaji dalam Tabel 18.

Tabel 18. Persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni.

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Akses menuju kawasan pesisir pantai	Sulit	34	89,47
		Mudah	4	10,53
2	Penyebab kawasan pesisir pantai sulit diakses	Tidak ada jalan utama menuju kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	18	47,37
		Kendaraan bermotor tidak dapat menjangkau kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	1	2,63
		Tambak udang menutup akses ke kawasan area mangrove	12	31,58
		Lainnya	3	7,89
3	Perlunya aksesibilitas perbaikan	Perbaikan jalan utama menuju kawasan pesisir pantai area mangrove dan tambak udang	31	81,58
		Tidak perlu perbaikan, jalur utama sudah bagus	0	0
		Perlu adanya jalur alternative	4	10,53
		Lainnya	3	7,89
4	Upaya perbaikan kemudahan aksesibilitas	Pembukaan jalur utama menuju pesisir pantai area mangrove dan tambak udang	22	57,89
		Pembukaan jalur untuk kendaraan bermotor	6	15,79
		Perluasan/pelebaran akses jalan menuju mangrove	6	15,79
		Lainnya	4	10,53

Sumber: Olah data, 2017.

Dari Tabel 18 di atas, dapat diketahui bahwa menurut 89,47% persepsi masyarakat berpendapat aksesibilitas kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area

tambak dan hutan mangrove sulit dan 10,53% berpendapat aksesibilitas kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove mudah. Dari 47,37% persepsi masyarakat yang menyatakan aksesibilitas sulit beranggapan bahwa faktor utama penyebab sulitnya mengakses kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove karena tidak ada jalan utama menuju kawasan pesisir pantai area hutan mangrove dan pendapat lainnya karena tambak udang menutup akses ke kawasan area mangrove sehingga kendaraan bermotor sulit menjangkau ke kawasan tersebut. Terdapat 81,58% responden memberikan saran untuk melakukan perbaikan jalan utama menuju kawasan pesisir pantai area mangrove dan tambak udang, 10,53% memberikan saran melakukan pembuatan jalur alternatif untuk kendaraan dan 7,89% responden menjawab lainnya.

Sedikitnya jumlah responden yang menganggap aksesibilitas mudah hanya 10,53% saja, sebesar 57,89% responden memberikan saran adanya pembukaan jalur utama menuju pesisir pantai area mangrove dan tambak udang. Hal ini dikarenakan memang akses dan kondisi jalan kurang memadai dan hanya memiliki satu jalur utama yang dapat dilalui untuk mencapai kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove. Kondisi jalan menuju kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni area tambak dan hutan mangrove tersaji dalam Gambar 8.



Gambar 9. Akses menuju kawasan pesisir pantai.

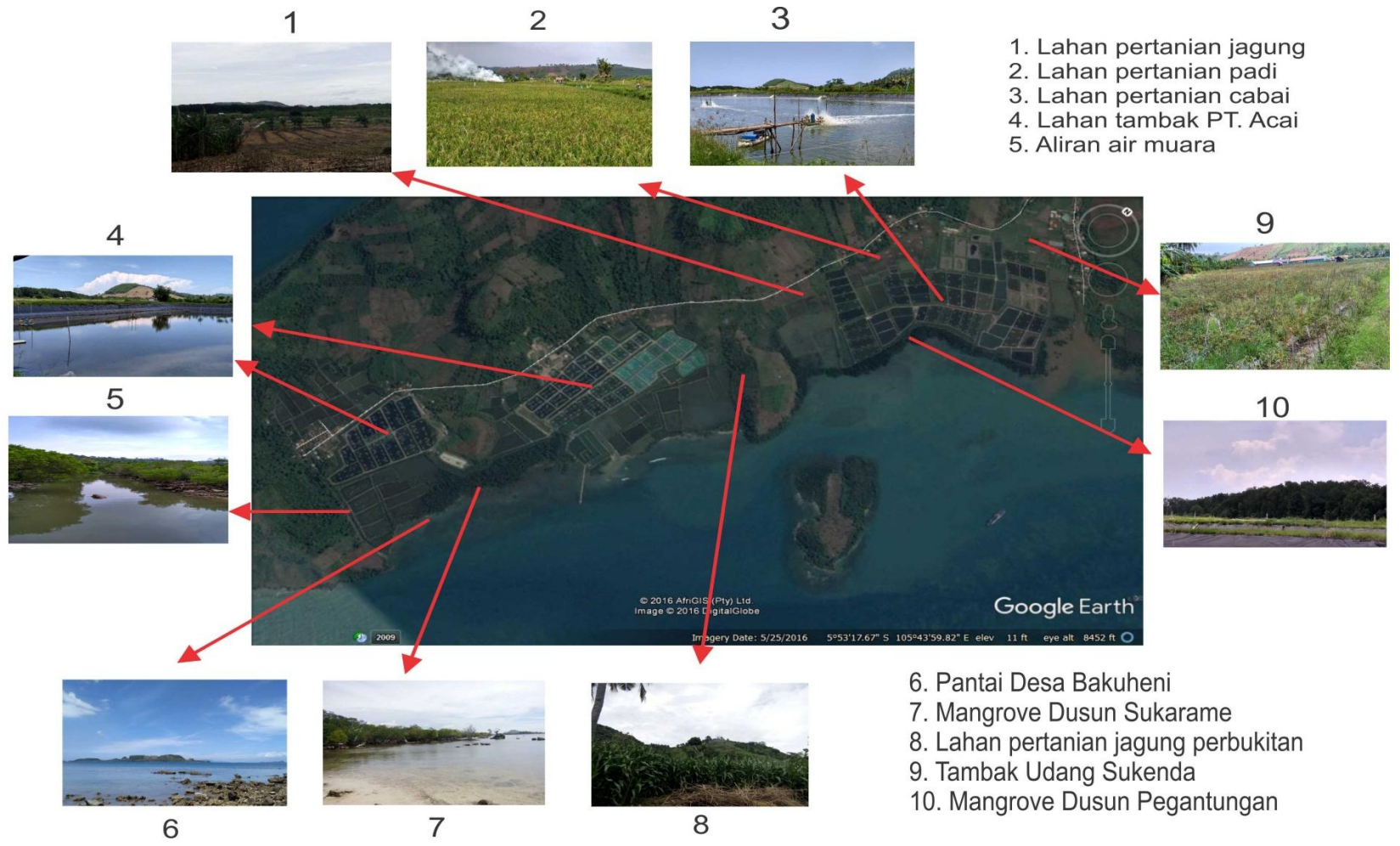
F. Identifikasi Potensi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakauheni

Dalam pengembangan dan pengelolaan suatu kawasan wisata, identifikasi untuk mendapatkan suatu rencana kawasan yang sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan perlu dilakukan. Potensi yang ada di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni dikelompokkan menjadi tiga yaitu potensi sumber daya alam, potensi pertanian dan perikanan, serta potensi ekonomi dan sosial. Masing-masing kelompok potensi memiliki daya tarik yang berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek wisata. Identifikasi lebih lanjut mengenai keberagaman potensi yang ada di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni menjadi suatu hal yang perlu untuk menentukan potensi wisata yang ada di dalamnya dan hubungan antara potensi-potensi yang ada.

Kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sedang dilakukan pengelolaan oleh masyarakat sebagai kawasan wisata. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat

sekitar pengembangan wisata di kawasan ini sudah lama direncanakan namun, baru saat ini masyarakat mulai merintis pengembangan kawasan sebagai obyek wisata pantai. Kawasan pesisir Desa Bakauheni dikenal sebagai “*spot fishing*” karena perairan laut Desa Bakauheni sangat produktif. Selain itu kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni juga dikenal sebagai kawasan budidaya tambak yang memiliki kawasan hutan mangrove yang masih alami. Tiga tahun terakhir kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni semakin terkenal dikalangan masyarakat luar daerah Lampung setelah salah satu siaran televisi menayangkan acara “*My Trip my Adventure*” di pesisir pantai Desa Bakauheni tepatnya area pemancingan Tanjung Tua. Dengan daya tarik dan potensi tersebut kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni tidak hanya kawasan wisata pantai tetapi juga hutan mangrove dan lahan pertanian hortikultura.

Dari masing-masing keberagaman potensi di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni dapat dikombinasikan dan dibentuk konsep Ekowisata. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber daya alam dan budaya masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Potensi kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni disajikan dalam Gambar 16.



Gambar 10. Peta Potensi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakauheni.

Kegiatan wisata di pesisir pantai Desa Bakauheni tidak hanya wisata hutan mangrove ataupun wisata pantai namun dapat pula kegiatan wisata yang dapat menambah wawasan wisatawan. Wisatawan dapat mempelajari keanekaragaman jenis mangrove dan ikut melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman mangrove dan kegiatan budidaya tambak udang serta kegiatan wisata petik buah melon. Selain itu, wisatawan juga dapat berkeliling Pulau Sindu menggunakan perahu milik nelayan. Saat perahu tidak beroperasi melaut dapat digunakan sebagai atraksi wisata air bagi wisatawan.

Kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata, namun dalam pengembangan perlu pengelolaan yang tepat dan kerjasama dari berbagai pihak agar berjalan dengan baik. Konsep ekowisata memanglah sangat cocok diterapkan di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni, khususnya area tambak udang dan hutan mangrove. Mata pencaharian petani dan nelayan yang membentuk budaya masyarakat menjadi faktor lainnya. Pengembangan ekowisata diharapkan tidak hanya memberikan manfaat peningkatan ekonomi dan mengangkat potensi daerah namun mempertahankan ekologi dan ekosistem suatu kawasan. Pengembangan ekowisata bertujuan sebagai salah satu strategi untuk mencegah degradasi lingkungan dan alih fungsi hutan mangrove sebagai lahan tambak, sehingga dapat diminimalisasi dengan kegiatan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan untuk menjadikan kawasan wisata terpadu dan berkelanjutan.

G. Konsep Penataan Pesisir Ruang Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung selatan merupakan salah satu kabupaten yang akan dikembangkan di Provinsi Lampung, termasuk pengembangan wisatanya. Pesisir pantai timur salah satu pesisir pantai dengan potensi hutan mangrove untuk dikembangkan wisata berbasis ekowisata, termasuk kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni. Atas dasar tersebut maka hal ini mendukung terwujudnya suatu perencanaan guna memperbaiki kawasan, yaitu mereduksi abrasi dan alihfungsi hutan mangrove di pesisir pantai Desa Bakauheni agar kawasan tetap menjadi kawasan *green belt* pesisir pantai Desa Bakauheni yang selanjutnya dapat menjadi potensi wisata daerah yang berkelanjutan. Penyusunan rencana program RZWP-3K ini sudah ada sejak tahun 2013-2033. Perencanaan program tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi program kerja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013.

Berikut ini dasar hukum Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

Pengembangan tata ruang kawasan pesisir pantai sebaiknya memperhatikan pada garis sempadan pantai. Kondisi pantai kawasan pesisir Desa Bakauhei saat ini telah mengalami pergeseran dan perubahan fungsi. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran daratan pantai dan kegiatan pembukaan lahan tambak mendekati di sempadan pantai. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) yang menjelaskan bahwa sempadan pantai salah satu

kawasan konservasi yang wajib dijaga kelestariannya, dilindungi dan dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan.

Konsep penataan ruang kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni terdapat dalam peta pola ruang (Lampiran 2). Di dalam peta tersebut telah ada pembagian kawasan sesuai pemanfaatan umum dan konservasi. Peta perencanaan pola ruang pada gambar 10 merupakan bagian dari penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Bappeda tahun 2013.

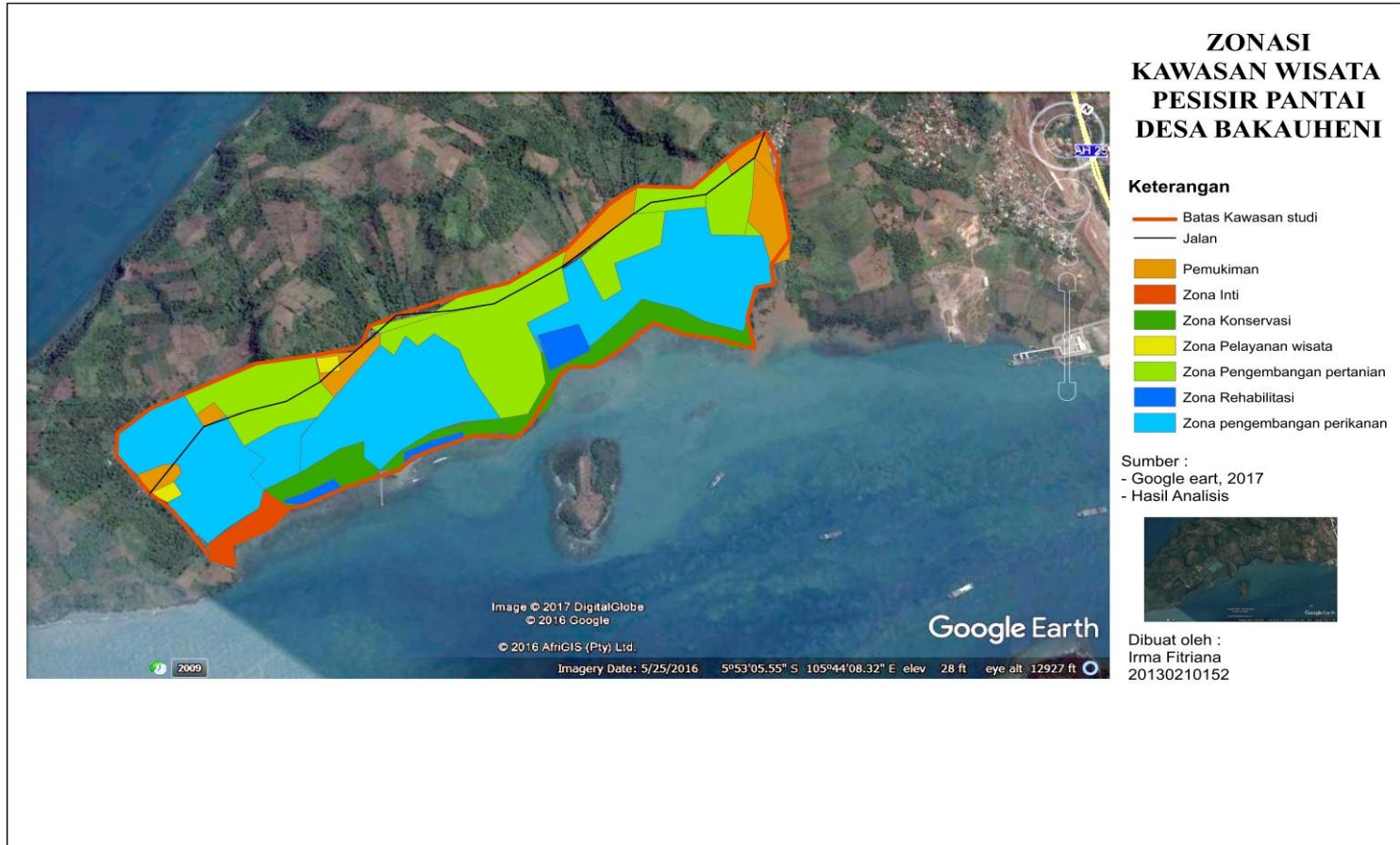
H. Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakauheni

Pengertian zonasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Zonasi kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni yang dimaksud ialah untuk membagi kawasan berdasarkan potensi yang pada pengembangan kawasan wisata khususnya ekowisata mangrove. Ekowisata yang akan dikembangkan haruslah mendukung fungsi kawasan wisata sekaligus memperhatikan ekosistem, ekologi hutan mangrove dan budaya masyarakat pesisir. Pengembangannya dilakukan berdasarkan potensi hutan mangrove yang dimiliki dan peruntukan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga fungsi pariwisata sejalan dengan fungsi konservasi.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.34/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil pembagian zona-zona pesisir pantai seperti zona konservasi, zona pemanfaatan (kawasan budidaya) dan zona pengembangan. Pengembangan dan pembagian zonasi kawasan wisata pesisir pantai Desa Bakauheni berdasarkan analisis dan identifikasi potensi kawasan. Pembagian zona juga berdasarkan dari pemanfaatan yang telah dilakukan sehingga tidak banyak merubah fungsi dari kawasan tersebut.

Zonasi kawasan pesisir Desa Bakauheni dibuat berdasarkan hasil analisis spasial dengan memanfaatkan sistem informasi geografi (SIG) dari *google earth*. *Google earth* juga digunakan sebagai dasar pemetaan kawasan sesuai dengan hasil observasi lapangan. Zonasi kawasan wisata pesisir pantai Desa Bakauheni tersaji dalam Gambar 11



Gambar 11. Peta Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakauheni.

1. Zona Inti

Zona inti merupakan area yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan atraksi/objek wisata yang saling berkaitan dengan daya tarik kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni. Dalam zona ini, daya tarik utama ekowisata meliputi daya tarik pantai, dan mangrove. Potensi sumber daya pesisir pantai yang menyajikan pemandangan laut serta Pulak Kandang Balak dan Pulau Sindu yang menjadi daya tarik wisatawan. Pada area zona inti dikembangkan juga objek wisata hutan mangrove. Langkah awal yang dilakukan masyarakat untuk pengembangan wisata hutan mangrove dengan membuat jalur-jalur *tracking* di sekitar mangrove untuk memudahkan wisatawan menikmati suasana hutan mangrove dan mengamati keanekaragaman jenis mangrove serta satwa yang hidup di dalamnya. Saat ini pengembangan sarana prasarana yang dilakukan masyarakat sekitar mengenai pengembangan wisata telah mencapai 45%. Sarana dan prasarana yang dibuat seperti menyediakan tempat duduk, gubuk istirahat pengunjung dan perbaikan jembatan seperti pada Gambar 12.



Gambar 12. Sarana dan prasarana yang sedang di bangun di kawasan pesisir pantai.

Penyediaan sarana dan prasarana sangatlah perlu untuk memberi kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Penataan mengenai pemanfaatan ruang yang lainnya pun perlu dilakukan agar penggunaan ruang dapat termanfaatkan berdasarkan fungsinya tanpa merusak ekologi pesisir pantai dan ekosistem hutan mangrove.

2. Zona Konservasi

Zona konservasi merupakan area yang didalamnya terdapat zona penyangga yang difungsikan sebagai kawasan untuk melindungi satwa dan ekosistem yang sangat rentan. Pemanfaatan pada area ini harus didasarkan atas pangaturan yang ketat. Kawasan pesisir pantai merupakan kawasan memiliki kerentanan terhadap abrasi sehingga perlu adanya konservasi untuk meminimalisir abrasi yang terjadi akibat gelombang laut dan debit air yang cukup besar saat musim hujan.

Berdasarkan pola ruang RTRW Lampung Selatan tahun 2011-2033, yang terdapat pada lampiran sepanjang kawasan pesisir pantai ditetapkan sebagai kawasan konservasi sempadan pantai dan konservasi mangrove perlindungan setempat. Artinya kawasan tersebut perlu dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat yang kegiatannya diawasi oleh pemerintah termasuk dengan keberadaan hutan mangrove disepanjang pesisir pantai sebagai sabuk hijau pantai. Kriteria sempadan pantai yang dimaksud adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimum 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pada kawasan konservasi mengacu pada pasal 92 ayat 1 diperuntukkan kegiatan ekowisata, budidaya pesisir, dan perikanan tradisional. Landasan hukum tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan ekowisata mangrove yang akan

dilakukan masyarakat pesisir pantai Desa Bakauheni. Pengembangan ekowisata mangrove dimaksudkan sebagai salah satu upaya perlindungan hutan dari alihfungsi kawasan dan pemanfaatan hutan mangrove berlebihan.

3. Zona Rehabilitasi

Zona rehabilitasi merupakan area diperuntukkan sebagai kawasan kegiatan penanaman kembali dan perbaikan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan, baik dari kerusakan alam maupun lingkungan. Pada zona rehabilitasi yang direkomendasikan merupakan area yang mengalami pengurangan dan kerusakan mangrove terbilang parah. Pembentukan kelompok pencinta lingkungan dari masyarakat Dusun Sukarame dan Dusun Pegantungan yang dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lampung Selatan (KPH) diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian mangrove. Kegiatan rehabilitasi ini diharapkan dapat mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Selain kegiatan rehabilitasi kawasan area pada zona rehabilitasi ini diperuntukkan sebagai area pembelajaran menanam mangrove bagi wisatawan yang berkunjung.

4. Zona Pengembangan

Zona pengembangan merupakan zona yang lebih mengarah pada kegiatan pengembangan dan budidaya pada masing-masing komoditas. Zona pengembangan dikelompokkan menjadi dua yaitu zona pengembangan pertanian dan zona pengembangan perikanan. Pada zona pengembangan pertanian di pesisir pantai Desa Bakauheni, masyarakat dapat mengembangkan komoditas hortikultura tanaman

pisang dan melon. Pemilihan komoditas ini didasarkan pada Perda Lampung Selatan pasal 34 ayat 1 huruf b bahwa Kecamatan Bakauheni diperuntukkan mengembangkan komoditas pisang. Pengembangan komoditas pisang didasarkan pada oleh-oleh makanan ciri khas Lampung yang terkenal dengan olahan kripik pisang coklatnya.

Zona pengembangan perikanan di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni tidak hanya komoditas udang namun komoditas lain pada jenis ikan tawar atau air payau seperti bandeng dan nila. Penentuan zona pengembangan perikanan didasarkan pada keberadaan kolam tambak yang sebelumnya sempat tidak digunakan lagi budidaya udang. Pengembangan perikanan pada zona juga didasarkan pada RZPW-3K bahwa pesisir pantai Desa Bakauheni merupakan area pengembangan perikanan. Selain itu pengembangan zona bertujuan agar taraf perekonomian dan potensi kawasan dapat meningkat serta dapat menambah daya tarik wisata di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni.

5. Zona Pelayanan Wisata

Zona pelayanan wisata merupakan zona semua kegiatan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan seperti rumah makan, atau tempat informasi. Penentuan zona pelayanan didasari pada letak area yang berdekatan dengan akses jalan dan sarana parasana yang telah ada. Zona pelayanan wisata kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni memanfaatkan daerah pemukiman yang berada di dekat pesisir pantai Desa Bakauheni dan area saran prasarana yang telah dirintis masyarakat saat ini. Saran yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan yakni pembangunan

warung-warung penjual makanan ringan dan sarana tempat duduk untuk bersantai para wisatawan.

Penetapan zona pelayanan wisata juga diharapkan menjadi pengaturan pemanfaatan tata ruang pesisir pantai Desa Bakauheni secara bijak. Zona pelayanan wisata yang ada di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni ditentukan dengan dasar pemanfaatan zona pelayanan yang saat ini sedang dirintis. Pada zona ini dapat dikembangkan berbagai pelayanan wisata seperti pusat informasi, area parkir, kamar mandi, warung makan, dan pusat oleh-oleh. Warung makan menyediakan masakan olahan udang, ikan dari hasil tambak maupun hasil laut lainnya. Petani juga dapat menjual hasil panennya berupa produk buah segar atau produk olahan. Selain itu masyarakat juga dapat menjual bibit tanaman mangrove sentigi (*Ceriops tagal*) dalam bentuk bonsai. Dengan begitu, wisatawan dapat menentukan suatu ciri khas dari objek wisata yang akan dikunjungi.

I. Desain Rencana Penataan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Desa Bakauheni

Dalam perencanaan penataan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sebagai kawasan ekowisata hal yang perlu diperhatikan beberapa aspek penunjang wisata berkelanjutan. Untuk itu penataan ruang pemanfaatan pesisir pantai perlu dilakukan. Kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni merupakan kawasan yang rentan terhadap abrasi pantai. Tipe pantai yang landai serta memiliki gelombang air laut yang cukup tinggi sehingga area daratan mudah terabrasi. Selain itu rusaknya dan pengurangan mangrove sekitar pesisir pantai memperparah abrasi pantai. Saat ini

abrasi telah mengikis daratan sejauh 15 meter dari bibir pantai. Tata guna dan pemanfaatan lahan merupakan salah satu upaya guna meanggulangi permasalahan tersebut. Penataan ruang pesisir didasari oleh ekosistem, ekologi dan eksisting kawasan pesisir pantai yang akan dikembangkan, Desain pengembangan dan penataan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sebagai kawasan ekowisata tertuang pada Gambar 14.

Pada Gambar 14 Desain terdapat beberapa tanaman dan atribut sarana prasaran yang dibuat sebagaimana fungsinya masing-masing.

1. Pemilihan jenis tanaman

Jenis tanaman yang dipilih untuk menunjang ektetika dan eksisting kawasan seperti tanaman kelapa, ketapang, mangrove jenis bakau, sentigi. Pohon kelapa ditanam di area depan karena memiliki fungsi sebagai penagkis angin laut kepemukiman, akarnya dapat pencegah erosi dan dapat menahan endapan lumpur. Tanaman ketapang ditanam sekitaran tempat bersantai pengunjung dan lahan parkir, ketapang memiliki tajuk indah bertingkat-tingkat yang berfungsi sebagai peneduh. Tanaman bakau ditanam untuk melindungi tepi pantai dari abrasi selain itu bakau berfungsi sebagai tanaman peyangga sekitar pesisir dari terjangan gelombang pasang air laut dan melindungi daratan. Sedangkan tanaman sentigi dipilih karena sentigi merupakan jenis mangrove yang memiliki tajuk pohon yang indah sangat dicocok digunakan sebagai fungsi estetika kawasan.

2. Pembuatan tanggul abrasi

Pembuatan tanggul penangkis gelombang dilakukan di tepian pantai pada area tanah yang rawan terhadap gerusan gelombang air laut. Tanggul penangkis gelombang dibuat di ujung aliran air muara dekat jembatan. Pembuatan tanggul di area tersebut dikarenakan pada area tersebut memiliki tekstur tanah yang sangat mudah terkikis atau mengalami abrasi gelombang air laut. Pembuatan tanggul diharapkan mampu melindungi area dari terjangan gelombang.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pengunjung

Sarana dan prasarana yang disediakan pengelola yakni kamar kecil, tempat duduk dan gubuk sebagai tempat bersantai bagi pengunjung. Jembatan sebagai akses penghubung dibuat untuk memudahkan pengunjung menjangkau area tepi pantai dan wisata mangrove. Selain itu dibuat juga jembatan menuju laut untuk pengunjung yang memiliki fungsi sebagai tempat berfoto dengan *background* laut, Pulau Kandang Balak dan Pulau sindu.

Penyediaan pusat informasi dan loket dibuat sisi barat berdekatan dengan area parkir, fasilitas mushola dan stand penjualan makanan, hal ini sengaja dilakukan agar pengelola dan pengunjung mudah untuk menyampaikan informasi terkait dengan area wisata. Pembangunan stand makanan di area ini juga bertujuan untuk meminimalisir pengunjung membuang sampah pada area wisata sehingga kelestarian pesisir pantai dan hutan mangrove tetap terjaga. Penyediaan fasilitas umum seperti kamar kecil akan ditempatkan pada kawasan inti pengembangan di beberapa titik area.



Gambar 13. Desain Kawasan Ekowisata Pesisir Pantai Desa Bakauheni.